

Pentingnya Penerapan Akuntansi Ponpes Pesantren Tarbiyah Islamiyah Pariangan

**Sri Adella Fitri, Suci Fitri Nabilla, Regina Ashifa Karim, Riski Nasution,
Tiara Ayunda, Ermila Sari**

Program Studi Akuntansi Syariah

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

sri.af@iainbatusangkar.co.id nabillasucifutri@gmail.com , reginaasyifa2003@gmail.com ,
riskinasution8006@gmail.com tiaraayunda0402@gmail.com, ermilarmb@gmail.com

ABSTRACT

Some of the phenomena that occur are that there are still many Islamic boarding schools that do not apply accounting to the recording of their financial statements. Therefore, this study was conducted to find out how the application of accounting at the Tarbiyah Islamiyah Pariangan Islamic Boarding School, and see how the financial reporting is. This research was conducted using the research method used is a qualitative research method, the sampling technique is by documentation and interview techniques. The results of the research obtained are, financial statements in the form of accountability reports. Tarbiyah Isamiyah Islamic Boarding School in recording its financial statements still has not applied accounting in it.

Keywords: *Islamic Boarding School, Islamic Boarding School Accounting, Financial Managemen*

I. PENDAHULUAN

Istilah akuntansi sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Kita sering menggunakan informasi yang berkaitan dengan uang, salah satunya di pondok pesantren, dan akibatnya, dunia akuntansi menjadi begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga kita hampir tidak menyadarinya. Lembaga pendidikan tinggi yang didirikan berdasarkan prinsip Islam, Pondok Pesantren, juga mengamanatkan akuntansi untuk manajemen. Laporan keuangan untuk pesantren tersedia, yang membantu pengelolaan uang dan menawarkan kemajuan dan perbandingan yang besar bagi sekolah. Beberapa tren yang muncul antara lain masih banyak pesantren yang belum mengetahui tata cara pembukuan dikarenakan kurangnya pemahaman tentang cara menyusun laporan keuangan yang sesuai berdasarkan peraturan akuntansi pesantren karena laporan keuangan yang sesuai dengan standar perlu disiapkan secara akurat. Oleh karena itu perlunya belajar

Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen saat membuat laporan keuangan. Mengingat pesantren harus terus berkembang dengan baik, maka sangat diperlukan penyusunan laporan keuangan yang memiliki dasar.

Pentingnya akuntansi disini adalah untuk memudahkan pembukuan di pondok pesantren sehingga pengelolaan keuangan dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

Adapun rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah mengapa penting untuk menggunakan akuntansi pesantren di pesantren seperti Pesantren Tarbiyah

Islamiyah (MTI), Tsanawiyah, dan Aliyah Paiangan.

Penelitian ini bertujuan agar dapat menganalisis penerapan akuntansi pada Pesantren Tarbiyah Islamiyah Pariangan mengetahui seberapa penting penerapan akuntansi pesantren studi pada Pondok Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI), Tsanawiyah dan Aliyah. Selain itu, agar pesantren dapat menerapkan prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangannya. Pada tahun 1952 frasa “sektor publik” pertama kali digunakan secara umum. Pada saat itu, pengelolaan ekonomi makro dalam kaitannya dengan pembangunan dan implementasi sering dikaitkan dengan sektor publik perkembangan.

Krisis ekonomi 1997 di Indonesia berkali-kali diakui sebagai pendorong reformasi keuangan dan akuntansi pemerintahan, yang kemudian diikuti oleh era reformasi pada tahun 1998 dan pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 1999. Tiga tahap dapat diidentifikasi dalam pembangunan negara dan pengelolaan keuangan daerah: masa sebelum otonomi, masa peralihan otonomi (tahap 1 reformasi), dan masa pasca peralihan (tahap 2). Perubahan pada setiap tahapan tersebut terlihat jelas dalam perkembangan peraturan perundang-undangan keuangan negara dan daerah, yang menunjukkan betapa pentingnya laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, seiring dengan dikeluarkannya berbagai instrumen dan lembaga pusat, sehingga berbagai asosiasi, termasuk Perhimpunan Perhimpunan Akuntan Indonesia, sebuah kompartemen baru yang disebut Kompartemen Akuntansi Sektor Publik sebagai tanggapan, yang merupakan langkah yang baik.

Negara Indonesia telah memulai reformasi akuntansi, dengan menyiapkan kerangka hukum dan menyusun standar akuntansi yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengukur laporan keuangan dan tetap menganut prinsip: prinsip adil, prinsip terbuka dan prinsip bertanggung jawab. Saat ini perubahan basis akuntansi sektor publik di Indonesia dari basis kas menjadi basis akrual tetap dilakukan secara berkelanjutan. Sistem manajemen dan kompetensi yang menjalankan sistem keuangan publik. Setidaknya sampai saat ini penganggaran berbasis kinerja di sektor publik telah menjadi tolok ukur untuk menilai berhasil tidaknya anggaran yang diserap oleh pemerintah pusat dan daerah.

Berbagai negara sudah bergerak menuju akuntansi berbasis akrual. Perkembangan ini tentunya menuntut para peneliti di sektor publik untuk lebih jeli dalam menelaah kekurangan baik dari sistem pengelolaan keuangan maupun kompetensi yang menjalankan sistem keuangan publik. oleh pemerintah pusat dan daerah.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat mendasar dan mendalam, ditandai dengan tumbuhnya keinginan akan akuntabilitas. Berbagai kritik bermunculan mempertanyakan peran sektor publik masih dipandang tidak efisien dengan perkembangan yang masih tertinggal jika dibandingkan dengan sektor swasta dan jauh tertinggal dari kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta. Pengungkapan kinerja dalam administrasi sektor publik. Lebih banyak perhatian harus diberikan pada sistem akuntansi dan audit dalam akuntansi sektor publik. Hal ini disebabkan pertumbuhan akuntansi sektor

publik berpusat pada pengukuran kinerja dan kinerja sektor publik.

Mengingat beragamnya kegiatan yang digeluti dan tujuan organisasi, organisasi nirlaba berkembang sebagai salah satu organisasi sektor publik di Indonesia dengan sangat cepat. Yayasan ini adalah organisasi nirlaba yang bekerja di sektor publik dan menawarkan bantuan di bidang pekerjaan sosial, agama, pendidikan, dan kemanusiaan. Tentunya diperlukan manajemen yang efektif untuk menjalankan tugas operasionalnya.

Pada Bab (7) Dalam UU No. 16 Thn 2001 Pasal (49) ayat (1) menyebutkan bahwa yayasan merupakan organisasi nirlaba yang wajib menyusun laporan keuangan tahunan menyampaikan dalam laporan keuangan disertai dengan laporan keadaan dan tindakan lain yang telah dilakukan secara tercatat. Ini berisi laporan status keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan (CALK).

Percobaan yang peneliti lakukan berpusat pada penerapan akuntansi di Pesantren Tarbiyah Islamiyah Kecamatan Tanah Datar Kabupaten Pariangan Sumatera Barat. Pondok Pesantren Tarbiyah Pariangan yang didirikan oleh H. Umar Bakri yang sebelumnya telah menyelesaikan studinya di MTI Jaho. Setelah mengambil ijazah, ia bersama sahabatnya, Dt. Sidano, dan Dt. Ahmad Dirajo, Kharuzzaman, dan Umar Khatib Mulia mendirikan madrasah Tarbiyah Islam pada tahun 1933.

Pesantren Tarbiyah Islam (MTI) terletak di daerah Jorong Padang Panjang Pariangan, Kabupaten Pariangan. Provinsi Sumatera Barat, Buya Umar Bakhri meninggal dunia pada tahun 1991.

Duskiman Saad Datuak Rajo Sindo, menantunya, mengambil alih sebagai ketua MTI. Dr Nasrul mengambil alih sebagai pemimpin setelah meninggalnya Duskiman. Kitab kuning dan pendidikan yang luas merupakan ciri Pesantren Tarbiyah Islamiyah Pariangan. Kurikulum Kementerian Agama, Kurikulum Layanan, dan Kurikulum MTI adalah tiga kurikulum yang sekarang digunakan oleh pesantren. Pondok Pesantren Tarbiyah menempati bangunan bertingkat dengan ventilasi dan pencahayaan yang memadai yang meliputi ruang kantor dewan guru, dan ruang belajar, dan kantor kepala madrasah, dan ruang perpustakaan, ruang UKS, dan ruang konseling. Jumlah santri pondok pesantren mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga saat ini. Penelitian awal di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Tsanawiyah/Aliyah yang berada di Jorong Padang Panjang Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Mengungkapkan bahwa Ponpes Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Tsanawiyah / Aliyah memiliki 183 santri dan merupakan salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tanah Datar. Bahwasanya dalam Penelitian ini terdapat beberapa permasalahan, salah satunya adalah pentingnya penggunaan akuntansi pesantren studi pada pondok pesantren.

II. KERANGKA TEORITIS

Salah satu lembaga pendidikan agama tradisional Indonesia, Pondok Pesantren sangat penting untuk pengembangan generasi penerus bangsa dan masyarakat Muslim. Keberadaan pesantren merupakan pilar penting, pemrakarsa, dan pengayom serta merupakan ciri masyarakat religius di Indonesia. Kontribusi terhadap pengembangan masyarakat Islam dan dukungan

pembangunan karakter masyarakat dan generasi bangsa tidak diragukan lagi. Banyak tokoh pendiri bangsa dan guru yang berasal dari pesantren. Dari kaum tani lahir putra terbaik negeri, motor penggerak peradaban dan masyarakat Islam. Ia bahkan ikut mendorong pendidikan ekonomi dan berbagai aspek masyarakat lainnya.

Pesantren umumnya didirikan melalui yayasan pendidikan. Pendidikan pondok pesantren dapat dimahkotai atas permintaan masyarakat sekitar pondok pesantren dengan cara membentuk tim dan menghibahkan tanah untuk pembangunan pondok pesantren atau melalui pengukuhan ulama atau kyai dengan menghibahkan harta tertentu untuk merintis berdirinya pondok pesantren. Bidang usaha yayasan sosial dapat berkembang dalam pendirian sekolah mulai dari kelas raudhatul athfal, madrasah ibditiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, hingga ma'had aly. Namun, ditemukan juga bahwa pesantren hanya membuka sekolah untuk kelompok madrasah tsanawiyah dan aliyah. (Rodiah et al., 2020).

Di pesantren juga terdapat unit-unit usaha yang menghasilkan pendapatan dalam upaya menghidupi dan mengembangkan pesantren. Tentunya manajemen usaha juga menggunakan proses akuntansi untuk menghasilkan informasi perkembangan usaha yang dimiliki pondok pesantren. Dukungan penuh pemerintah terhadap pengembangan pondok pesantren merupakan salah satu sarana untuk menjadikan pondok pesantren berdampingan dan bersinergi dengan masyarakat. Perkembangan kuantitas jumlah pondok pesantren cukup menggembirakan. (Suharsono & Triyuwono, 2020).

Yayasan pesantren harus mematuhi aturan akuntansi keuangan saat membuat

laporan keuangan karena merupakan lembaga nirlaba. Biasanya menuntut laporan keuangan yang menyoroti kemungkinan penipuan di dalam Yayasan Pondok untuk menjamin akuntabilitas keuangan dan keterbukaan dalam pengelolaan yayasan. (Safitri & Narastri, 2023). Pesantren telah memiliki SDM yang mempunyai nilai-nilai Islami dalam pengelolaan keuangan ditambah dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan pesantren, semakin menegaskan keunggulan pesantren. (Saifuddin et al., 2023). Untuk mendapatkan informasi yang dapat dipahami, dan relevan, transparansi dan akuntabilitas harus didukung oleh sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang efektif. (Rizal et al., 2018).

Ungkapan khas untuk sesuatu yang melayani tujuan sosial, lingkungan, atau tujuan lain selain keuntungan finansial adalah "nirlaba". Organisasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendukung tujuan atau subjek dengan mendapatkan perhatian publik berfungsi sebagai organisasi nirlaba, tanpa mempedulikan masalah mencari keuntungan. Instansi pemerintah, serikat pekerja, asosiasi profesional, lembaga penelitian, museum, rumah sakit dan klinik umum, dan lembaga pendidikan adalah contoh organisasi nirlaba. (Yenti & Fitri, 2014).

Pesantren wajib menyelenggarakan majelis masyarakat di bawah arahan kyai tentang Pesantren yang sesuai dengan UU No.18 Tahun 2019. Rentetan kerusuhan yang melanda ponpes terjadi sebelum undang-undang tersebut lahir. Tujuan dan kearifan lokal pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang jumlahnya menurut informasi Kemenag tahun 2018 telah melebihi 28.194 belum diperhitungkan tentang Pendidikan Nasional terdapat

pada UU. No. 20 Tahun 2003, dan UU SISDIKNAS).. (Yulivan, 2019). Tepatnya pada tanggal 9 Maret 1983 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah telah dikeluarkan tepat 20 tahun setelah diundangkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1964, sekaligus mencabut penetapan Peraturan Menteri Agama. Peraturan Agama No. PMA No. 13 Tahun 1964. Berikut adalah faktor-faktor primer yang dituangkan dalam klausul penimbangan PMA No. 3 Tahun 1983: "Peningkatan mutu pendidikan di madrasah dalam pemerataan yang dilakukan perlu dilakukan standarisasi kurikulum madrasah dan review Permenag 13 Tahun 1964," sebutnya. (Gultom, 2019).

Dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, yang dimaksud dengan:

1. Pesantren yang biasa disebut surau meunasah atau pesantren adalah organisasi berbasis lingkungan yang didirikan oleh warga swasta, yayasan amal, kelompok sosial Islam, dan pengabdian kepada Allah SWT. Mereka menumbuhkan karakter yang baik dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam yang tercermin dalam kualitas luhur bangsa Indonesia yang rendah hati, toleran, seimbang, dan moderat.
2. Pesantren untuk Umat Islam Pendidikan diselenggarakan oleh pesantren, yang membuat kurikulum dengan mempertimbangan karakteristik unik mereka dan didasarkan pada kitab kuning atau pada pendidikan Islam dengan model pendidikan mullimin.
3. Kitab Kuning yang tersedia dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya menjadi standar bagi tradisi keilmuan Islam yang diajarkan di pesantren.

4. Dirosah Islamiyah merupakan badan kajian keislaman yang terstruktur, metodis, dan terorganisasi dengan mengikuti model pendidikan muallimin.
5. Dengan membuat kurikulum yang sesuai dengan karakteristik pondok pesantren berdasarkan Kitab Kuning atau Islamiyah dengan pola pengajaran yang bertingkat dan terstruktur. Pendidikan mu'allimin, pendidikan mu'allimin adalah pendidikan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal.
6. Sesuai dengan prinsip pesantren berdasarkan Kitab Kuning, pendidikan diniyah formal adalah pendidikan pesantren yang dilakukan secara metodis secara bertahap.
7. Ma'had ini merupakan pondok pesantren papan atas yang didirikan oleh pesantren dan terletak di lingkungan pesantren. Itu diciptakan dengan mengubah Islam secara bertahap agar sesuai dengan fitur pesantren berdasarkan Kitab Kuning. (Hamdanah, 2023)

Mengenai sistem pendidikan nasional yang juga memasukkan pelajaran agama, lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Madrasah Islam adalah sebagai berikut:

- a. Pesantren
- b. Pendidikan diniyah nonformal, yaitu:
 - 1) Buku petunjuk majelis taklim
 - 2) Pendidikan Al-Quran
 - 3) Pendidikan Diniyah atau Takmiliah, dan
 - 4) Bentuk lain yang sejenis

Keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan masuknya agama dan pendidikan agama dalam undang-undang ini, yang akan membantu menaikkan standar pendidikan agama Islam. Hal ini terjadi karena pendidikan agama diberi kedudukan

yang sama dengan pendidikan umum dalam hal pembiayaan, sarana dan prasarana, pembinaan, dan lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut. (Kompri, 2018)

Akuntansi berfungsi sebagai sistem informasi dengan melacak transaksi dalam jurnal yang nilainya dapat dinyatakan dalam istilah moneter. Kemudian, catatan keuangan diperoleh dan disediakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan serta tanggung jawab untuk manajemen bisnis. (Rosita Andarsar, 2022). Akuntansi sangat penting untuk entitas lembaga pendidikan karena memungkinkannya membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan menghilangkan keraguan tentang laporan keuangan lembaga, terutama yang bersifat ekonomi. (Rozaidin & Adinugraha, 2020) Akuntansi syariah adalah pencatatan, pengelompokan, penjumlahan, dan pelaporan transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang berdasarkan prinsip syariah. (Rizal et al., 2017).

Untuk membantu pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan, sistem data akuntansi merupakan kumpulan media dan fitur akuntansi. Kombinasi atribut khusus ini memerlukan aliran dan prosedur metodis. dan teratur agar hasilnya dapat memahami informasi data mentah dan menghasilkan laporan keuangan yang mudah diakses. otoritas pihak internal atas proses pengambilan keputusan harus dipahami dan difasilitasi. (Fitriani et al., 2022).

Tujuan informasi akuntansi adalah untuk melayani kepentingan publik sehingga dalam konteks Islam, setiap orang berhak mengetahui dampak kegiatan organisasi terhadap kesejahteraan mereka sendiri dan untuk menerima akuntansi tentang bagaimana organisasi bekerja

sesuai dengan persyaratan syariah organisasi berjalan dan apakah tujuan telah tercapai. (Syukri et al., 2023). Pelaporan akuntabilitas keuangan sangat diperlukan untuk pertumbuhan pesantren, dan persyaratan ini didukung oleh publikasi aturan akuntansi pesantren. IAI dan BI mendukung penerbitan aturan akuntansi pesantren karena pertumbuhan pesantren membantu dalam meningkatkan sistem ekonomi dan pendidikan negara. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI) menetapkan dan merilis standar akuntansi pesantren pada tahun 2018. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang diakui secara umum dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pesantren dan lingkungan di bidang pengelolaan keuangan.

Berikut beberapa pedoman penanganan keuangan pesantren: 1. Membuat strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pondok Pesantren (RAPBPP). 2. Pemanfaatan anggaran 3. Pesantren bertanggung jawab secara finansial (Suharjono, 2019). Arahan ini mengatur bagaimana laporan keuangan pesantren disajikan, diakui, dan diungkapkan. Pada kenyataannya, penyajian laporan keuangan pesantren memiliki beberapa ciri Namun, laporan keuangan pesantren harus mencakup empat laporan keuangan independen berikut: 1) Gambarkan situasi keuangan Anda; 2) Laporan aktivitas 3) Laporan arus kas 4) Catatan laporan keuangan.

Pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan bendahara pondok pesantren dan dilakukan dengan sistem uang masuk, uang keluar, dan saldo, uang masuk berasal dari biaya pendidikan yang dibayarkan oleh wali santri dan dana dari donatur, seluruh biaya operasional pondok pesantren ditanggung oleh dana keluar.

Perbedaan antara uang masuk dan keluar adalah saldo. Pelaporan oleh bendahara kepada direktur dan yayasan setiap bulan dengan melampirkan neraca dan nota pengeluaran .

Pengawasan atas penggunaan keuangan dilakukan secara berkala oleh direktur; yaitu bendahara melaporkan keuangan, termasuk saldo bulan sebelumnya, penerimaan dana dan penggunaannya, serta saldo pada saat rapat diadakan. Dalam penerapannya, kondisi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran dilaporkan oleh bendahara kepada pengurus pada saat terjadinya transaksi, terutama penggunaan dana yang harus mendapat persetujuan dari pimpinan pondok pesantren.(Wardiyono, 2021)

Aturan akuntansi pesantren tersebut di atas hanya berlaku bagi lembaga yang berbadan hukum yayasan. Standar akuntansi pesantren tidak berlaku untuk badan usaha yang dimiliki secara sah, seperti perseroan terbatas. (Suherman, 2019). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI) mendukung pengelolaan keuangan pesantren antara lain karena pertumbuhan pesantren berkontribusi pada perbaikan ekonomi negara dan sistem pendidikan. (Rachmani, 2020).

Laporan keuangan memberikan penyajian sistematis tentang status keuangan dan hasil operasi perusahaan. Sementara pendapatan dan beban terkait langsung dengan kinerja laporan laba rugi, aset, kewajiban, dan ekuitas terkait langsung dengan penilaian status keuangan di neraca. Item laba rugi serta beberapa penyesuaian pada item neraca ditampilkan dalam laporan arus kas. (Fitri & Usra, 2022)

Menurut Fidiana (2017), Pembuatan laporan keuangan berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban

manajemen atas sumber daya yang digunakan, sekaligus sebagai alat pencatatan yang telah terjadi. Ini mempengaruhi pesantren dalam situasi ini juga. Sebaliknya, jika pesantren memiliki catatan keuangan yang kuat, maka bisa dikatakan maju. Perkembangan pesantren dapat didukung dalam jangka panjang jika semua pemangku kepentingan lebih percaya diri dalam proses pencatatan dan pelaporan dana. Khilmiah dan Wahidahwati tahun 2020 Laporan keuangan harus disajikan dengan benar dan sesuai dengan kriteria yang mudah dipahami, relevan, andal, dan komparatif agar bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kinerja dan reputasi perusahaan di masa mendatang. (Fitria et al., 2022)

Untuk tujuan pembuatan laporan akuntansi dan keuangan, PSAK berfungsi sebagai kerangka acuan. Tata cara penyusunan, penatausahaan, dan penyajian laporan keuangan diatur oleh PSAK. (Hamdi et al., 2021).

Sebaliknya, Standar Akuntansi Keuangan SAK (2009) menyatakan bahwa laporan keuangan, yang biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, termasuk laporan arus kas dan laporan arus kas) , adalah bagian penting dari keseluruhan proses pelaporan keuangan. tunai), catatan, serta laporan tambahan dan dokumentasi pendukung yang merupakan elemen penting dari laporan keuangan. (Atufah et al., 2018).

Interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK), selain SAK dan PSAK beserta tujuannya, dimuat dalam pedoman proses akuntansi yang dikembangkan oleh IAI. ISAK 35 secara khusus membahas penyajian laporan keuangan untuk

organisasi nirlaba. Hal ini sebelumnya dicakup oleh PSAK 45, yang kemudian dicabut dan diganti dengan ISAK 35, yang mulai berlaku 1 Januari 2020 dan mengatur pelaporan untuk organisasi nirlaba.

Apa pun bentuk organisasinya, hanya organisasi nirlaba yang tercakup dalam ISAK 35. Aturan akuntansi lain yang dianut oleh perusahaan nirlaba mengacu pada ISAK atau turunannya yang terkait karena ISAK 35 hanya mengatur pelaporan laporan keuangan. Organisasi nirlaba harus mengubah deskripsi laporan keuangan dari berbagai pos dan/atau deskripsi laporan keuangan itu sendiri. (Setiawan & Christopher, 2021).

Menurut kajian terdahulu oleh Muhammad Rozaidin dan Hendri Hermawan Adinugraha dari fakultas ekonomi dan niaga Islam IAIN Pekalongan, seharusnya pesantren memanfaatkan akuntansi karena merupakan organisasi ekonomi. Koperasi Pesantren Al Hasyimi menjadi tempat penelitian ini. Dapat dikatakan bahwa Koperasi Pesantren Al Hasyimi dapat mengimplementasikan akuntansi pesantren. Masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan akurasi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang sesuai dalam pencatatan. (Rozaidin & Adinugraha, 2020)

III. METODE PENELITIAN

Metode-metode yang diterapkan dalam penelitian ini didasarkan pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara penelitian menggunakan alat utama dengan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah pengumpulan fakta-fakta alam dengan tujuan menganalisis kemungkinan peristiwa atau kondisi. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dikenal sebagai instru

menelitian. Subjek penelitian adalah orang-orang yang berperan penting terhadap penerapan studi akuntansi pada pondok pesantren, objek dalam penelitian ini yaitu pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI), Tsanawiyah, dan Aliyah Pariangan. Adapun informan dan narasumber adalah bagian dari kepala sekolah Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI), Tsanawiyah, dan Aliyah, tata usaha dan bendahara pondok pesantren.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Jadi, peneliti adalah orang yang mencari, mengambil, mengolah, dan mengumpulkan data. Observasi langsung menjadi metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Setelah melakukan observasi, langkah selanjutnya adalah mewawancarai pengurus pesantren dan orang-orang yang terlibat. Yang ketiga adalah mendapatkan dokumen pendukung. Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah dalam bentuk penelitian lapangan, dan dilakukan dalam situasi nyata.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan dan Evaluasi

Penerimaan dana diterima Ponpes Pesantren Tarbiyah Islamiyah adalah dari dana Boss, dana komite dan dana dari masyarakat yang diakui sebagai penerimaan dan penambahan dana. Penerimaan dana ini selanjutnya di catat dalam laporan pertanggung jawaban yang dibuat pertahun. Namun pengakuan penerimaan dana Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah belum sesuai dengan ISAK 35.

Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah tidak menggunakan metode perhitungan nilai wajar yang sesuai dengan PSAK yang

bersangkutan, sehingga pengukuran akseptasi tidak dapat diterima.

Pencatatan

Pencatatan yang dilakukan Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah adalah dengan membuat Rencana Anggaran Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran lain dibuat dalam laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Bendahara Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah.

Penyajian

Penyajian yang dilakukan Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah belum lengkap dan belum menyajikan 4 komponen Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan keuangan lengkap sesuai dengan ISAK 35. Adapun laporan yang disajikan Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah adalah Laporan Pertanggung jawaban dan Laporan Anggaran Belanja Bantuan Operasional (BOS).

Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah belum sesuai dengan ISAK 35 dikarenakan tidak adanya 4 komponen laporan keuangan yang sesuai ISAK 35.

Dari penelitian yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah, maka hasil yang didapatkan adalah Pondok Pesantren ini nyatanya belum ada menerapkan akuntansi pada pengelolaan keuangannya.

Kendala yang dialami oleh pondok pesantren pada saat ini yaitu tentang

pendanaan, yang awalnya tidak ada bantuan pemerintah dalam pengelolaan pondok pesantren. Dana dana yang didapatkan berasal dari dana bos, dana komite dan dana dari masyarakat.

Pengendalian yang dilakukan pondok pesantren dalam pembangunan dan pembiayaan operasional madrasah maka langkah yang di ambil oleh pondok pesantren yaitu dengan menyebarkan proposal pada bulan puasa serta pada hari biasa kepada tokoh masyarakat.

Aktivitas perekonomian yang dilakukan pondok pesantren yaitu adanya sebuah lahan yang di tanami kayu manis, pada waktu tertentu siswa di perintahkan untuk gotong royong ke lahan tersebut. Selanjutnya aktivitas perekonomiannya ada koperasi Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang dikelola oleh guru pondok pesantren.

Laporan penggunaan pengeluaran dana pada Pondok Pesantren ini dibuktikan atau dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban yang dibuat per tahun, pembukuannya sendiri dibuat melalui aplikasi yang sudah sesuai rujukan pemerintah. Selain itu, pengeluaran yang dilakukan dibuktikan dengan adanya kwitansi atau surat bukti pembayaran.

Pedoman pengelolaan keuangan pesantren yang dilakukan pondok pesantren dilakukan dengan cara menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pesantren (RAPBP).

Pernyataan di atas di perkuat dengan hasil laporan keuangan tentang rencana anggaran belanja bantuan operasional sekolah (BOS).

V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, peranan akuntansi pada pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren seharusnya lebih diperkenalkan dan pihak pesantren seharusnya dapat mengetahui dan dapat menerapkan akuntansi pada pengelolaan keuangannya, agar pengelolaan keuangan lebih tepat dan sesuai dengan SAK yang telah ditetapkan di Indonesia. Dengan diterapkannya akuntansi pada Pondok Pesantren ini, maka laporan keuangan pondok pesantren dapat lebih dipertanggung jawabkan sehingga pihak pihak yang berkepentingan dapat melihat bagaimana perkembangan Pondok Pesantren dan Pondok Pesantren dapat lebih berkembang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atufah, I. D., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah. *International Journal of Social Science and Business*, 2(3).
- Fitri, S. A., & Usra, Z. I. (2022). SENTIMAS: Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Assistance in the Preparation of Financial Statements Based on SAK ETAP at BUMNag Wahana Karya Mandiri Barulak. *SENTIMAS*.
- Fitria, N., Fitri, S. A., Rahmi, M., Guspendri, N., & Marlin, K. (2022). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK ETAP di BUMNag Baringin Saiyo Kecamatan Lima Kaum. *AJAD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).

- Fitriani, N. I., Fitri, S. A., Marlin, K., & Melia, Y. (2022). Analisis Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada RSUD Sungai Rumbai. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1).
- Gultom, F. M. (2019). *Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia*. Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Hamdanah. (2023). *Administrasi Pendidikan Madrasah Diniyah*. Penerbit Ananta.
- Hamdi, H., Nurainun, S., Umar, M. P., Moroge, M., Sultan, I., & Gorontalo, A. (2021). Peran Akuntansi Terhadap Efektivitas Pengendalian Keuangan Pesantren (Al- Islam Gorontalo). *Akasyah- Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit Syariah*, 1(2).
- Khilmiah, E. N., & Wahidahwati. (2020). Implementasi Akuntansi Pesantren Pada Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren As Safali Al Fitrah Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(12).
- Kompri. (2018). *Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren*. PRENADAMEDIA.
- Rachmani, F. A. (2020). Pengaruh Pengetahuan tentang Pedoman Akuntansi Pesantren terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pesantren. *Proceeding of National Conference On Accounting & Finance*, 2, 39–46.
- Rizal, Fitri, S. A., & Minazzulami, H. (2017). PSAK 109: Telaah Penerapannya Pada Baznas Kabupaten Solok. *Jurnal Imapara*, 1(1).
- Rizal, Fitri, S. A., & Rantika, D. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Jurnal Al- Iqtishad*, 1.
- Rodiah, S., Satria, W., Agustina Putri, A., Azmi, Z., Gita Suci, R., Marlina, E., Putri Azhari, I., Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Muhammadiyah Riau, U. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum Pantai Raja Kampar. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 133–138.
- Rosita Andarsari, P. (2022). Analisa Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP Pada Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Al-Ikhlas Singosari-Malang. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 10(3), 357–366.
- Rozaidin, M., & Adinugraha, H. H. (2020). Penerapan Akuntansi Pondok Pesantren (Studi pada Koperasi Pondok Pesantren Al Hasyimi Kabupaten Pekalongan). *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 4(2), 123.
- Safitri, R. N., & Narastri, M. (2023). Implementation Of Financial Management Accountability And Transparency According To The Interpretation Of Financial Accounting Standards (ISAK 35) At The Assalafi Al Fithrah Islamic Boarding School Foundation, Surabaya. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(3), 1781–1789.
- Saifuddin, Amin, S., Febriyanti, Jamaludin, Jalwis, Ningsih, I. dkk (2023). *Manajemen Lembaga Pendidikan*

- Islam* (M. Imanuddin, Ed.). Media Sains Indonesia.
- Setiawan, T., & Christopher, A. (2021). *Mahir Akuntansi Keuangan* (M. Ariyani, Ed.). Bhuna Ilmu Komputer.
- Suharjono. (2019). Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren. *Jurnal Ekulibrium*, 8(2).
- Suharsono, J., & Triyuwono, I. (2020). *Akuntansi Utang* (A. Kamayanti, Ed.). Penerbit Peneleh, Anggota IKAPI.
- Suherman, L. P. (2019). Analisis Pentingnya Akuntansi Pesantren Bagi Pondok Pesantren Al-Matuq Sukabumi. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(2).
- Syukri, M., Fitri, S. M., & Syafhariawan, H. (2023). Analisis Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren Al-Muthmainnah Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren. *Jurnal Economia*, 2(1).
- Wardiyono, K. (2021). *Manajemen Kepemimpinan Pondok Pesantren* (Tim Ainun Media, Ed.). CV. Ainun Media.
- Yenti, E., & Fitri, A. (2014). Analisis Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Balance Scorecard Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar. *JURIS*, 13(2).
- Yulivan, I. (2019). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pondok Pesantren Dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan* (T. Lestari, Ed.). CV Jakad Media Publishing.